

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP BELANJA MODAL PROVINSI PAPUA
(2014-2019)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan

Universitas Ahmad Dahlan

Yogyakarta



Disusun Oleh:
PUTRI AMALIAH A
NIM 1700010157

**PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA**

Ringkasan Eksekutif

Pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD tahun 2014 hingga tahun 2019 salah-satunya didominasi oleh pengeluaran belanja modal yang dimaksudkan untuk mendanai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk meningkatkan kemampuan dalam pelayanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum. Sumber data untuk mendukung penelitian ini berasal dari Publikasi Badan Pusat Statistik mengenai Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2014-2019 yang dipublikasikan pada laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Kata Kunci: *Dana alokasi Umum, Belanja Modal Daerah*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama otonomi daerah yang meliputi: tujuan administratif, tujuan politik dan tujuan ekonomi. Salah-satu hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan administratif adalah dengan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk pada sumber keuangan, serta pembaruan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa otonomi daerah akan berhasil jika didukung oleh kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Namun dalam membantu kemandirian pemerintah daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan, maka pemerintah pusat melakukan transfer dana yang disebut dengan DAU (Dana Alokasi Umum) yang dimaksudkan sebagai usaha pemerintah pusat dalam menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang terwujud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap belanja modal pada Provinsi Papua. Penelitian terkait sebelumnya menemukan hasil yang berbeda-beda. Misalnya pada penelitian oleh

Herman Yawa dan Treesje Runtu yang menemukan hasil bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (tahun 2010-2014), sedangkan penelitian lain oleh Hairiyah, Lewi Malisan, dan Zaki Fakhroni menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal (tahun 2010-2015).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang akan diteliti adalah:

Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Provinsi Papua dari tahun 2014-2019?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Provinsi Papua dari tahun 2014-2019

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan bagi pembaca mengenai hubungan dan pengaruh Dana Alokasi Umum pada Provinsi Papua. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu untuk dijadikan pedoman atau sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain dalam membuat penelitian dengan lingkup yang sama, serta bagi pengambil atau pembuat kebijakan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Belanja Modal Daerah

Belanja modal daerah adalah salah-satu dari pengeluaran daerah dalam rangka mendanai pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dalam meningkatkan kemampuan serta pelayanan masyarakat dimana nilai manfaatnya lebih dari setahun. Belanja modal antara lain dipergunakan untuk:

- Belanja modal tanah: Diperuntukkan dalam pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.
- Belanja modal peralatan atau mesin: Pengeluaran yang dimaksudkan untuk pengadaan peralatan atau mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya dalam memperoleh dan mempersiapkan hingga peralatan atau mesin tersebut siap digunakan.
- Belanja modal gedung dan bangunan: Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan

bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

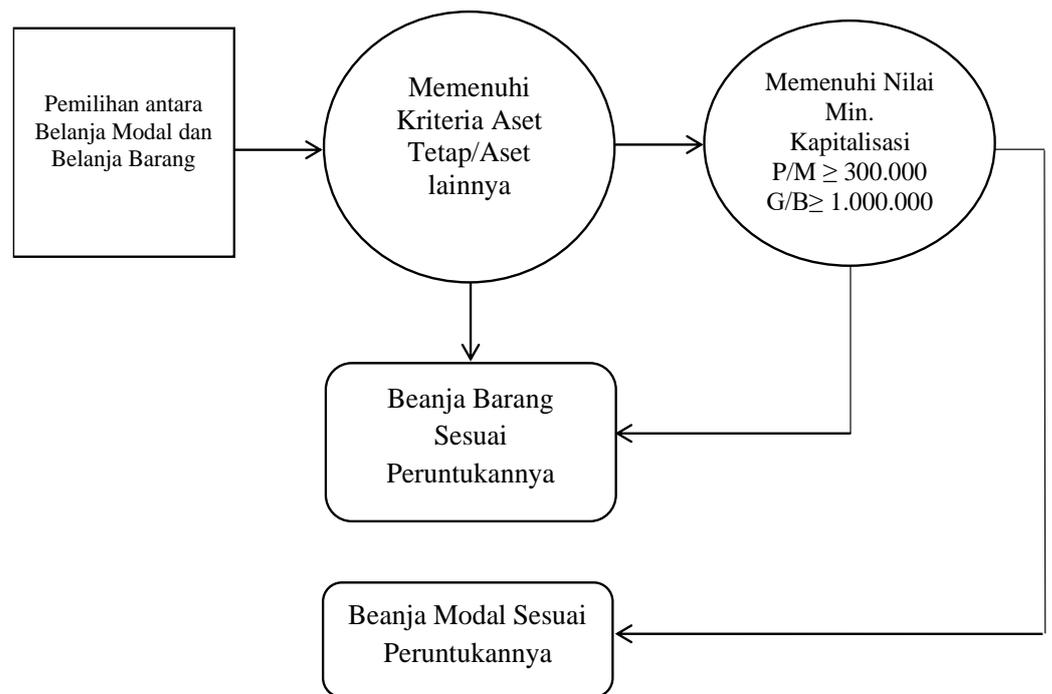
- Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan: Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.
- Belanja modal lainnya: Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

- Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU): Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

Dari uraian tersebut, maka pemerintah daerah seharusnya melakukan peningkatan perbaikan aturan komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui alokasi belanja modal. Klasifikasi Perbedaan antara Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Klasifikasi perbedaan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa



*) Sumber: Kemenkeu, 2011

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/asset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/asset:

- Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan
- Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset.
- Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp300.000,- dan Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan perpaket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,-
- Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) yang termasuk kedalam Dana Perimbangan adalah salah-satu bentuk transfer dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah provinsi atau kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah

salah-satunya dalam membiayai belanja modal daerah yang merupakan usaha pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi dan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan pemerintah dengan berbagai bentuk program kerja seperti peningkatan pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang kemudian akan memicu pada peningkatan pendapatan masyarakat. Perhitungan DAU dibagi atas beberapa tahapan, diantaranya:

- **Tahapan Akademis**

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh tim Independen dari berbagai Universitas sebagai tujuan dalam memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Karakteristik Otonomi di daerah.

- **Tahapan Administratif**

Dimana pada tahapan ini Kemenkeu dan DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyiapan data dasar perhitungan DAU (konsolidasi dan verifikasi data) untuk mendapatkan validitas dan kemitakhiran data yang kemudian akan digunakan.

- **Tahapan Teknis**

Merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan DAU yang kemudian akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana telah diamanatkan

- **Tahapan Politis**

dalam UU dengan menggunakan data dan memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis. Tahapan ini adalah tahapan akhir, yaitu pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dan panitia kerja Belanja Anggaran Daerah DPR RI untuk konsultasi dan melakukan persetujuan atas hasil perhitungan DAU.

Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) dan Alokasi Dasar (AD) yang berupa jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah. Komponen variabel kebutuhan fiskal antara lain: jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Sedangkan, komponen variabel kapasitas fiskal antara lain: sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana Bagi Hasil.

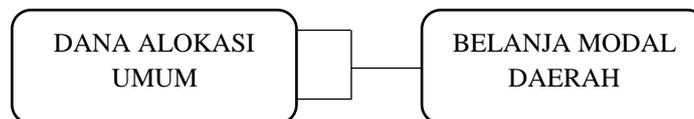
B. Landasan Teori Sebelumnya

Tabel 2. 1

Peneliti	DAU
Eko Indra Praza	
Havid Sularso dan Yanuar E. Restianto	
Ni Made Deni Indiyanti dan Henny Rahyuda	
Julius Tamawiwiy, Jullie J Sondakh, dan Jessy D.L Warongan	
Kurni Adi Suwandi dan Afrizal Tahar	
Hady Sutjipto, Stania Cahaya Suci, dan Yogi Sabarudin Umbara	
La Ode Abdul Wahab, Siti Rofingatun, Balthazar Kreuta	
Herman Yawa dan Tresjee Runtu	+
Hairiyah, Lewi Malisan, dan Zaki Fakhroni	-
Waskito, Zuhrotun, dan Ruserlisyani	+
Engkos Kosim	+

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menemukan hasil yang berbeda-beda. Misalnya pada penelitian oleh Herman Yawa dan Treesje Runtu yang menemukan hasil bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan penelitian lain oleh Hairiyah, Lewi Malisan, dan Zaki Fakhroni menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.

C. Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, dimana data diperoleh dan dikumpulkan dari pihak lain (BPS). Sumber data untuk mendukung penelitian ini ini berasal dari Publikasi Badan Pusat Statistik mengenai Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi yang dipublikasikan pada tahun 2014 dan 2019 pada laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

B. Metode Analisis

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena apa adanya dengan cara mengumpulkan data-data yang kemudian disusun dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan daerah kekuasaan yang sangat luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebijakan aturan undang-undang yang berlaku. Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang melimpahkan segala kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pengelolaan anggaran sektor publik dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing.

Namun dalam membantu kemandirian pemerintah daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan, maka pemerintah pusat melakukan transfer dana yang disebut dengan DAU (Dana Alokasi Umum) yang dimaksudkan sebagai usaha pemerintah pusat dalam menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang terwujud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan daerah.

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Papua menurut Jenis Pengeluaran
(ribu rupiah), 2014-2019

Tabel 4. 1

TAHUN	JENIS PENGELUARAN		
	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Hibah
2014	1.521.457.321	36.839.387.037	33.018.207.958
2015	2.297.824.333	45.158.055.320	39.957.250.083
2016	4.033.172.998	44.776.710.219	53.831.992.474
2017	4.809.070.337	47.328.596.653	51.090.706.312
2018	9.299.080.025	51.522.238.203	51.941.417.069
2019	9.484.476.205	64.003.299.654	50.349.438.008

*) Sumber: BPS 2014 – 2019

Secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD Provinsi Papua dari tahun 2014 hingga tahun 2019 yang dipublikasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) didominasi oleh komponen belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal. Ketiga komponen ini kemudian menjadi menarik untuk dikaji, baik secara parsial maupun secara simultan. Salah-satu komponen pengeluaran pemerintah daerah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah komponen belanja modal. Berikut merupakan data Provinsi dengan pendapatan Dana Alokasi Umum terbesar di Indonesia (ribu rupiah), Data Provinsi dengan Realisasi Pengeluaran Belanja Modal terbesar di Indonesia (ribu rupiah), dan data Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2014 - 2019.

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Pemerintah Provinsi

(ribu rupiah), 2014- 2019

Tabel 4. 2

TAHUN	PROVINSI			
	PAPUA	JAWA TIMUR	JAWA TENGAH	JAWA BARAT
2014	1.991.202.341	1.866.548.185	1.803.931.189	1.687.686.386
2015	2.277.932.698	1.587.261.707	1.629.429.283	1.303.654.355
2016	2.502.449.137	1.672.878.372	1.859.907.223	1.248.112.172
2017	2.570.118.273	3.687.183.876	3.652.586.431	2.992.041.501
2018	2.571.298.119	3.813.411.928	3.688.746.159	3.023.552.986
2019	2.616.545.381	3.998.431.715	3.784.512.513	3.212.647.404

*) Sumber: BPS 2014 - 2019

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi (ribu rupiah), 2014-2019

Tabel 4. 3

TAHUN	PROVINSI			
	DKI JAKARTA	ACEH	KALIMANTAN TIMUR	PAPUA
2014	10.411.118.390	2.397.502.366	2.211.317.315	1.689.302.792
2015	10.244.016.709	2.025.103.489	2.010.917.819	2.865.461.762
2016	8.965.470.015	2.284.852.301	1.571.814.627	2.490.333.442
2017	11.045.723.234	2.503.941.130	925.853.954	3.530.217.100
2018	14.118.608.088	2.529.205.112	1.829.259.943	2.490.333.442
2019	18.355.384.156	3.624.044.113	1.430.451.320	3.530.217.100

*) Sumber: BPS 2014 – 2019

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi
tertinggi-terendah, 2014-2019

Tabel 4. 4

TAHUN	PROVINSI	
	JAKARTA	PAPUA
2014	78,39	56,75
2015	78,99	57,25
2016	79,60	58,05
2017	80,06	59,09
2018	80,47	60,06
2019	80,76	60,84

**) Sumber: BPS 2014 - 2019*

Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa Provinsi dengan tingkat IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dan provinsi dengan IPM terendah adalah Provinsi Papua. Sedangkan, jika dilihat pada tabel 1.2 dan 1.3, diketahui bahwa Provinsi Papua merupakan Provinsi dengan pendapatan Dana Alokasi Umum terbesar di Indonesia dan menjadi salah-satu Provinsi dengan pengalokasian Belanja Modal yang terbesar pula di Indonesia. Dimana belanja modal ini dimaksudkan untuk mendanai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk meningkatkan kemampuan dalam pelayanan masyarakat. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan alat-alat pengolahan dan pemeliharaan pertanian, alat-alat kedokteran dan kesehatan, alat-alat laboratorium, alat peraga/praktek sekolah, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, pengelolaan sampah, buku/kepuustakaan, persenjataan/ keamanan, dan sebagainya. Melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah-satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia

(masyarakat/penduduk) dan juga dalam menilai level pembangunan suatu wilayah/Negara.

Oleh sebab itu, sebagai Provinsi yang terletak dibagian paling timur Indonesia, menjadikan tantangan tersendiri bagi pengelola pemerintah Provinsi Papua dalam mengelola pemerintahan termasuk kinerja keuangannya dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila terdapat peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari DAU maka dapat membantu dalam menciptakan peningkatan kombinasi input produksi daerah yang lebih optimal. Dengan demikian, dengan peningkatan pendapatan yang bersumber dari DAU ini, maka akan meningkatkan alokasi terhadap belanja modal Provinsi Papua dalam menunjang tujuan pemerintahan yaitu meningkatkan pelayanan Publik dan pembangunan daerah. Hasil penelitian ini justru tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Hairiyah, Lewi Malisan, dan Zaki Fakhroni (2017) yang mengemukakan bahwa DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena DAU dialokasikan dalam membiayai belanja selain belanja modal, seperti belanja pegawai barang dan jasa, serta pengalokasian terhadap belanja lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Provinsi Papua merupakan Provinsi dengan pendapatan Dana Alokasi Umum terbesar di Indonesia dan menjadi salah-satu Provinsi dengan pengalokasian Belanja Modal yang terbesar pula di Indonesia. Dimana belanja modal ini dimaksudkan untuk mendanai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk meningkatkan kemampuan dalam pelayanan masyarakat. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan alat-alat pengolahan dan pemeliharaan pertanian, alat-alat kedokteran dan kesehatan, alat-alat laboratorium, alat peraga/praktek sekolah, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, pengelolaan sampah, buku/kepustakaan, persenjataan/keamanan, dan sebagainya. Hal ini kemudian menjadi menarik untuk dikaji, melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah-satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan juga dalam menilai level pembangunan suatu wilayah/Negara.

B. Saran

Apabila terdapat peningkatan pada realisasi DAU, sebaiknya diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Provinsi Papua. Peningkatan PAD ini dapat dilakukan dengan menggali potensi keuangan daerah dengan mengoptimalkan Kinerja Keuangan Daerah. Dengan didukung dengan kinerja keuangan yang baik, tentu Pemerintah Daerah akan memiliki ruang yang luas untuk pembiayaan program pemerintahan dalam rangka pembangunan daerahnya. Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran daerah dengan baik. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang kemudian menciptakan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki daerah dan memberikan proposi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan sektor-sektor produktif di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2017). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014-2017. – 149
- Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2016-2019, 1–149.
- Hairiyah, Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap Belanja Modal. *Kinerja*, 14(2), 85–91.
- Hamsiah, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*.
- Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(9), 4713. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i09.p04>
- Kartika. (2014). Kabupaten Tangerang , Banten.
- Kosim, E. (2017). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA BANJAR. *Journal of Management Review*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.25157/jmr.v1i1.509>
- Kusuma, D. P., Nabila, D. T. Della, S, I. D. K. Y., Manan, A., Dwianika, A., Sofia, I. P., ... Bieltant, R. (2019). Apbn 2019. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 13(1), 85–92.
- Menciptakan, T., & Secara, T. (2018). Transformation :

Praza, E. I. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, Vol. 4(1), 25–36.

Sanuari, A. (2015). Jurnal Keuda Vol. 2 No. 3. *Keuda*, 2(3), 1–17.

Sanuari, A. (2015). Jurnal Keuda Vol. 2 No. 3. *Keuda*, 2(3), 1–17.

Sutjipto, H., Suci, S. C., & Umbara, Y. S. (2019). Analisis Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia. Hamsiah, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*.

Sutjipto, H., Suci, S. C., & Umbara, Y. S. (2019). Analisis Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 3(2), 104. <https://doi.org/10.35837/subs.v3i2.609>

Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2016). PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *InFestasi*, 11(2), 118. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1127>

Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2016). PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL

Tamawiwiy, J., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. . (2016). PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK (Studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 7(2), 103–124. <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13555>

UU No. (2002).

UU Nomor 33 Tahun 2004. (2004), 55. Retrieved from <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>

Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Ruserlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia,* 3(2), 220–238. <https://doi.org/10.18196/rab.030247>

Yanto, J. K. F., & Astuti, S. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA),* 2(3), 346–357. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i3.484>

Yawa, H., & Runtu, T. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Kota Manado the Influences of General Allocation Fund (Dau) District Own. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi,* 15(04), 390–400

LAMPIRAN

A. Lampiran 1

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Papua menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2014-2019

Lampiran 1

TAHUN	JENIS PENGELUARAN		
	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Hibah
2014	51.521.457.321	36.839.387.037	33.018.207.958
2015	52.297.824.333	45.158.055.320	39 957 250 083
2016	54.033.172.998	44.776.710.219	53.831.992.474
2017	64.809.070.337	47.328.596.653	51.090.706.312
2018	70.299.080.025	51.522.238.203	51.941.417.069
2019	89.484.476.205	64.003.299.654	50.349.438.008

B. Lampiran 2

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Pemerintah Provinsi (ribu rupiah), 2014-2019

Lampiran 2

TAHUN	PROVINSI			
	DKI JAKARTA	ACEH	KALIMANTAN TIMUR	PAPUA
2014	10.411.118.390	2.397.502.366	2.211.317.315	1.689.302.792
2015	10.244.016.709	2.025.103.489	2.010.917.819	2.865.461.762
2016	8.965.470.015	2.284.852.301	1.571.814.627	2.490.333.442
2017	11.045.723.234	2.503.941.130	925.853.954	3.530.217.100
2018	14.118.608.088	2.529.205.112	1.829.259.943	2.490.333.442
2019	18.355.384.156	3.624.044.113	1.430.451.320	3.530.217.100

C. Lampiran 3

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi (ribu rupiah), 2014-2019

Lampiran 3

TAHUN	PROVINSI			
	PAPUA	JAWA TIMUR	JAWA TENGAH	JAWA BARAT
2014	1.991.202.341	1.866.548.185	1.803.931.189	1.687.686.386
2015	2.277.932.698	1.587.261.707	1.629.429.283	1.303.654.355
2016	2.502.449.137	1.672.878.372	1.859.907.223	1.248.112.172
2017	2.570.118.273	3.687.183.876	3.652.586.431	2.992.041.501
2018	2.571.298.119	3.813.411.928	3.688.746.159	3.023.552.986
2019	2.616.545.381	3.998.431.715	3.784.512.513	3.212.647.404

*) Sumber: BPS 2014 – 2019

D. Lampiran 4

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi, 2014-2019

Lampiran 4

TAHUN	PROVINSI	
	JAKARTA	PAPUA
2014	78,39	56,75
2015	78,99	57,25
2016	79,60	58,05
2017	80,06	59,09
2018	80,47	60,06
2019	80,76	60,84